Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat

Government Policy During The Covid-19 Pandemi: Between Welfare State and Healthy State

Rianda Dirkareshza^{1)*}, Dinda Maurizka Azura²⁾ & Roni Pradana³⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

³⁾ Panitia Perancang Undang-undangan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggali dan meneliti lebih dalam bagaimana kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan di masa pandemi Covid-19 ini untuk menciptakan negara sejahtera dan negara sehat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan literatur *review* dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat Pandemi Covid-19 ini terlihat menitikberatkan pada prinsip negara sehat apabila ditinjau dari segi kuantitas. Tidak menutup kemungkinan yang besar apabila dilihat dari segi kualitas, sebagai negara sejahtera juga salah satu tujuan dari beberapa rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rangkaian kebijakan-kebijakan tersebut dinilai cukup efektif, namun tidak dapat dirasakan secara langsung dampak positifnya untuk jangka panjang.

Kata Kunci: Covid-19; Kebijakan Pemerintah; Negara Sejahtera dan Negara Sehat

Abstract

This paper aims to explore and examine more deeply how the policies that the government issued during the Covid-19 Pandemi were to create a Welfare State and Healthy State. The method used in this writing is a normative method with a literatur review approach using the statutory provisions in force in a country or a doctrinal legal approach method, namely legal theories and opinions of legal scientists, especially those relating to the issues discussed. The results of the study show that the policies issued by the government during the Covid-19 Pandemi seemed to focus on the principle of a healthy country in terms of quantity. It does not rule out a large possibility when viewed from a quality perspective, as a Prosperous Country is also one of the objectives of several policy frameworks issued by the government. These series of policies are considered quite effective, but the positive impacts cannot be directly felt in the long term.

Keyword: Covid-19; Government Policy; Welfare State and Healthy State

How to Cite: Dirkareshza, R. Azura D.M. & Pradana R. (2021). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat. *Jurnal Mercatoria*. 14 (1): 46-55.

PENDAHULUAN

State of art penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai suatu panduan ataupun contoh bagi penulis untuk melakukan penelitian saat ini. Contoh penelitian yang diambil berupa tesis, skripsi dan jurnal yang memiliki objek penelitian yang sama yaitu Kebijakan Pemerintah di masa Covid-19. Salah satu jurnal berjudul “Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia” ditulis oleh Annas Rizaldi dan Zulfa Harirah MS yang diterbitkan dalam repository Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Unsyiah pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia membawa masalah yang cukup serius dalam segala aspek. Penularan virus mematikan ini secara massif telah menguras banyaknya energi negara, dalam hal ini pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan beragam kebijakan dalam segala bidang serta untuk seluruh lapisan masyarakat guna menangani wabah Covid-19. *Lockdown* bukan merupakan salah satu dari kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, banyaknya dampak ekonomi adalah salah satu alasan. Dari aspek kesehatan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dapat diterima sebagai cara jitu menghindari penularan Covid-19. Apabila dilihat dari sisi ekonomi, pemerintah terkesan bertahap untuk menghindari dampak ekonomi secara drastis, sehingga Pembatasan Sosial Sekala Besar (selanjutnya disebut PSBB) adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Nalar secara logika darurat kesehatan ini mampu diterima secara rasional oleh masyarakat. Namun terjadi respon yang berbeda oleh masyarakat menengah ke bawah. Ketidakpastian ketahanan ekonomi keluarga membuat masyarakat kelas menengah ke bawah “terpaksa”

mendobrak nalar rasionalitas negara dalam kebijakan penanganan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketika negara mampu menjamin ketahanan ekonomi setiap keluarga, maka rasionalitas negara dan masyarakat akan sama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini (Harirah, 2020).

Dari jurnal yang ditulis oleh Darmin Tuwu pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam repository Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19” penelitian ini menunjukkan bahwa dari seluruh kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19 agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang jauh lebih penting adalah pemerintah selaku *leader and decision maker*, harus menyiapkan skema kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) tidak hanya untuk para golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ketika pemerintah dapat menyiapkan skema kebijakan yang baik (*good policies*) untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus corona kepada masyarakat, maka dengan itu pula pemerintah dianggap berhasil menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang baik (*good government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di era Pandemi Covid-19. (Tuwu, 2020)

Jurnal yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Selanjutnya Bappenas) dengan judul “Edisi Khusus tentang Covid-19, *New Normal*, dan Perencanaan Pembangunan” yang ditulis oleh Muhyiddin dan Hanan Nugroho pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian bahwa optimisme dan sentimen positif ekonomi baru akan terjadi jika pandemi Covid-19 dapat diatasi, setidaknya menunjukkan tanda-tanda terkendali dan akhirnya dapat

diselesaikan. Upaya PSBB sangat penting dikedepankan, sebelum nanti vaksin Covid-19 akan ditemukan, atau kita terpaksa harus berdampingan dengan Covid-19 sebagai sebuah cara hidup di zaman normal baru. fenomena VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*) makin sering terlihat. Pandemi Covid-19 semakin mengungkap titik lemah sistem kesehatan, dan banyak sistem lainnya di tanah air. Guncangan terhadap sistem kesehatan berpengaruh pada prioritas alokasi fiskal. Pengalihan perhatian ke sektor kesehatan berimplikasi pada penurunan prioritas pada sektor-sektor non-kesehatan, yang berdampak perubahan haluan pembangunan. Ke depan hal seperti ini akan sering terjadi (Muhyiddin, 2020). Jurnal – jurnal tersebut saling berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tema penelitian terhadap kebijakan pemerintah di masa Covid-19 yang akan diangkat oleh Penulis berfokus kepada bagaimana cara pemerintah menghadapi dan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang efektif bagi masyarakat dan mendukung dari aspek kesehatan dan kesejahteraan.

Covid-19 menjadi perhatian dunia pada Januari 2020. Penyebaran virus yang cepat dan meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi memicu reaksi cepat dari pemerintah China (Zhang et al., 2020). Pemerintah di negara maju telah menanggapi Pandemi Covid-19 dengan tanggapan kebijakan yang dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar ekonomi telah diperintahkan untuk ditutup dan jutaan pekerja harus tinggal di rumah tanpa batas waktu (Alon et al., 2020). Ketika Covid-19 menyebar ke negara-negara yang kurang berkembang, pembuat kebijakan di sana sebagian besar mengikuti dengan kebijakan yang serupa. Namun dengan cepat menjadi jelas bahwa tanggapan kebijakan di negara berkembang tidak bisa hanya meniru tindakan yang dilakukan negara barat.

Masyarakat di seluruh dunia sedang mempertimbangkan apakah manfaat kesehatan dari kebijakan anti penularan sepadan dengan biaya sosial dan ekonominya. Banyaknya biaya ini harus diamati dengan jelas. Misalnya, pembatasan bisnis meningkatkan pengangguran dan penutupan sekolah memengaruhi hasil pendidikan (Hsiang et al., 2020). Covid-19 telah menunjukkan bahwa tindakan diperlukan untuk mengatasi sifat pandemi yang menyebarluas dengan cepat serta ketidakadilan kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Tindakan ini harus didukung dan didorong oleh kebijakan yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada (Baker et al., 2020). Keadaan darurat kesehatan masyarakat dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kedua individu (menyebabkan, misalnya, ketidakamanan, kebingungan, isolasi emosional, dan stigma) dan komunitas (karena kerugian ekonomi, penutupan pekerjaan dan sekolah, sumber daya yang tidak memadai untuk medis. respon, dan distribusi kebutuhan yang kurang) (Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., 2020).

Ide kebijakan berfungsi sebagai "perekat" integratif yang menyatukan tindakan kebijakan di sekitar rencana tindakan. Komitmen politik untuk alasan yang kuat memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab selaras pada tujuan bersama dan cara yang diperlukan untuk mencapainya (Carter & May, 2020). Kebijakan yang tepat dan berlandaskan keseimbangan antara negara yang sejahtera dan negara yang sehat. Apabila pemerintah dalam hal ini Pemerintah Negara Indonesia mengambil keputusan yang salah akan menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan terhadap negara. Beberapa negara merasa lebih mungkin untuk mencapai pertanggungjawaban global melalui asuransi kesehatan wajib yang dikelola oleh perusahaan asuransi di

bawah regulasi dan pengawasan ketat oleh pemerintah (Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., 2020). Kebijakan tersebut yang dilakukan oleh negara secara keseluruhan untuk menanggulangi dampak pandemi, namun bagaimana dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi, apakah sudah baik dan mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakatnya ataukah hanya mengedepankan aspek kesehatan saja tanpa memperdulikan perekonomian negara.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai kebijakan pemerintah di masa Pandemi COVID-19, dimana Penulis mencoba melihat apakah pemerintah sudah menerapkan kebijakan yang tepat dan bertujuan untuk menjadi negara sejahtera dan negara sehat. Menurut data yang diterbitkan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat dilihat tren positif bahwa angka pasien terpapar sangat rendah dan berbanding terbalik dengan pasien yang sembuh meningkat tajam.

Gambar 1 (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dibandingkan dengan data pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Data ini cukup berbanding terbalik dibandingkan dengan tren positif yang dihasilkan dalam penanganan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07

persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen (Badan Pusat Statistik, 2021).

Gambar 2 (Badan Pusat Statistik, 2020)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan jurnal, sehingga dapat menghasilkan sebuah jurnal yang berkualitas yaitu jurnal yang memenuhi syarat penelitian (Soemitro, 1990). Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah *literer* atau penelitian perpustakaan (*library research*), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan jurnal ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik) (Hadi, 1980). Dalam penulisan jurnal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*). Dalam pembahasannya penulis

menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1985). Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum positif untuk menemukan keseimbangan pemerintah dalam menyusun peraturan dalam penanggulangan bencana skala pandemi yang disebabkan Pandemi Covid-19. Selain itu menelaah secara normatif tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Penulisan jurnal ini bersumberkan pada sumber bahan penelitian primer dan sumber bahan penelitian sekunder, yaitu (Arikunto, 2000):

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1995) seperti UUD 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
3. bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia (Ammiruddin and Asikin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19

Di masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini segi kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama (Ratih & Junaidi, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Guna menjaga stabilitas dan memulihkan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Peraturan Pengganti Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (*Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional*, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan masyarakat merasakan keresahan dan kerugian yang berdampak pada kesehatan maupun perekonomian, sehingga, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Pandemi Covid-19 (Juaningsih, 2020). Akibat utama yang paling disoroti pada kebijakan tersebut adalah membuat para pengusaha mengambil langkah untuk melakukan pengurangan karyawan untuk menekan biaya kerugian dan operasional imbas dari Pandemi Covid-19.

Sektor pertanian tak luput menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia (Diwangkara, 2020). Pemerintah juga tidak melupakan betapa pentingnya sektor pangan dalam penanganan pandemi, apabila hal ini terlewatkan dapat mengakibatkan keributan dikarenakan tingginya harga bahan pangan di masa pandemi. Kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perubahan pola rantai pasok pangan, meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan serta optimasi distribusi pangan.

Menurut sektor pariwisata, Bali yang merupakan destinasi wisata internasional, menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama sehingga dampak pandemi sangat terasa bagi perekonomian Bali dan juga pelaku pariwisata di dalamnya, seperti hampir sekitar 98% objek wisata, hotel, restoran, spa dan fasilitas pariwisata ditutup untuk umum. Oleh karena itu membawa keterpurukan yang sangat hebat bagi perekonomian rakyat Bali sendiri, dengan meningkatnya pengangguran dan juga masalah yang dihadapi oleh manajemen hotel untuk keberlangsungan hotel mereka karena biaya operasional hotel seperti kebersihan, air, listrik, dan perawatan gedung harus tetap berjalan walaupun tidak beroperasi (Asmoro et al., 2020) Pemerintah tidak dapat melakukan banyak hal pada sektor ini mengingat pola penyebaran Covid-19 sangat cepat di lokasi wisata yang rentan terjadi kerumunan diantaranya.

Kegiatan keagamaan pun turut dibekali kebijakan oleh pemerintah dengan diberlakukannya beribadah di rumah masing-masing terutama dikhususkan daerah yang berzona

merah/wilayah yang menerapkan PSBB. Hal ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19 (Fahiza & Zalikha, 2021, p. 29). Dalam sektor ini pada awal dikeluarkannya kebijakan tersebut, pemerintah mendapatkan penolakan yang cukup keras dari masyarakat. Namun tujuan dari pemerintah sendiri adalah melakukan mitigasi bencana agar tidak menyebar lebih meluas.

Dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi Covid-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring (Iping, 2020). Meskipun niat pemerintah sangat disambut baik oleh masyarakat dengan diberikannya bantuan ini, pada tataran eksekusi pemerintah gagal mengimplementasikannya secara tepat sasaran mengingat salah satu pembantu presiden terkena kasus korupsi berkenaan dengan dana bantuan sosial. Miris melihat fakta lapangan tersebut mengingat niat yang baik namun dieksekusi oleh orang yang tidak tepat.

Sektor pendidikan pun tidak luput dalam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, diatur dalam Ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Baik orang tua mahasiswa, orang tua siswa dan mahasiswa mendapatkan dampak positif dari kebijakan ini mengingat rendahnya pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia di masa Pandemi Covid-19 ini.

Pada sektor keuangan, OJK beserta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan baik jasa keuangan perbankan, pasar modal maupun non perbankan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Pandemi Covid-19 (Septiana Na'afi, 2020). Terdapat beberapa langkah stimulus berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK pada sektor keuangan khususnya dalam bidang jasa keuangan pasar modal antara lain pembelian kembali (*buyback*) saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuatif secara signifikan, penyederhanaan mekanisme perdagangan saham di pasar modal, relaksasi penyampaian laporan berkala, penyelenggaraan RUPS oleh emiten dan perusahaan publik dan perubahan jam perdagangan di bursa efek.

Beberapa sample acak dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan disaat

Pandemi Covid-19 melanda di Indonesia. Indonesia dirasa cukup efektif mengeluarkan sejumlah kebijakan tersebut namun tidak dapat dirasakan secara langsung semuanya perih dampak positifnya, hal ini akan dirasakan secara berjangka kedepannya.

Fokus Pemerintah antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat

Pemerintah dalam hal ini menjadi penentu arah kebijakan skala nasional yang menjadi nahkoda untuk tujuan tertentu. Tentu Pemerintah Negara Indonesia tidak dapat menitikberatkan kepada titik manapun dalam menentukan kebijakan, seluruh kebijakan sudah pasti berlandaskan asas *welfare state* yang memiliki arti negara yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah selama Covid-19 melanda Indonesia.

Tabel 1. Daftar Peraturan atau Kebijakan terkait Kesejahteraan dan Kesehatan

Kebijakan terkait Kesejahteraan	Kebijakan terkait Kesehatan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang <i>Refocusing</i> Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Covid-19	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara

Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	Ekspor Antiseptic, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker
Siaran Pers Kementerian Perekonomian Nomor: HM.4.6/32/SET.MEKON.2.3/03/2020 tentang Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak Covid-19	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindung dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Covid-19	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab	Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretarian dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Pemeriksaan <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR)	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggara Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi <i>Rapid Test Antibody</i>	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu
Ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2020 tentang Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, BOS Afiriasi dan BOS Kinerja	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19
Surat edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal	Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di perusahaan	Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19	Surat Edaran Kepala BNPB Nomor SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia no. 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pengaduan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19	Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/III/375/2020 tentang Penggunaan Bilik Disinfeksi dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19
Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia no. SE-07/BC/2020 tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang yang Menggunakan Skema Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Tarif Preferensi) Sebagai	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di

Dampak Pandemi Covid-19	Lingkungan Instansi Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
	Surat Edaran Menteri Kementrian dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Satuan Pendidikan
	Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negri Sipil atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Conference pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Covid-19
	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Daerah
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Apabila dianalisa secara kuantitas jumlah aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memang lebih menitikberatkan kepada negara sehat ke depannya, namun ini tidak dapat dilihat secara kuantitas saja. Apabila melihat dalam prespektif kualitas aturan aturan yang dibuat untuk menuju negara sejahtera dimasa Pandemi dirasa cukup adil, luas dan efektif. Namun tidak dipungkiri apabila masyarakat masih banyak terpapar Covid-19 artinya roda penggerak bangsa pun akan rapuh yang tetap menyebabkan Indonesia terpuruk dalam jurang kemiskinan.

Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita mengikuti seluruh aturan maupun kebijakan pemerintah untuk mensukseskan segala tujuan bangsa. Sejatinnya bangsa ini memiliki visi dan misi yang baik untuk seluruh warga negaranya. Dengan mengikuti segala kebijakan ini dapat dipastikan masyarakat akan terbebas dari Covid-19 dan pasca penyebaran pun akan menjadi penentu arah kemajuan bangsa ke depannya.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat Pandemi Covid-19 melanda Indonesia dirasa cukup efektif, namun sejumlah kebijakan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung semuanya perihal dampak positifnya, hal ini akan dirasakan secara berjangka ke depannya. Pemerintah menyusun segala kebijakan bertujuan agar masyarakat merasakan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan maupun keadilan. Sebagai warga negara kita dapat membantu pemerintah dengan cara mengikuti segala kebijakan yang ada untuk menyongsong welfare state.

DAFTAR PUSTAKA

- Alon, T., Kim, M., Lagakos, D., & VanVuren, M. (2020). *How Should Policy Responses To the Covid-19 Pandemi Differ*.
- Ammiruddin and Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2000). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Asmoro, A. Y., Bachri, T. B., & Detmuliati, A. (2020). Analisis Potensi Wisata Desa Dengan

- Kerangka 6A Studi Kasus Desa Ngajum, Malang. *Media Wisata*, 18(2), 231–250. <https://doi.org/10.36275/mws>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. In *Www.Bps.Go.Id* (Issue 17). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Baker, P., White, A., & Morgan, R. (2020). Men's health: COVID-19 Pandemi highlights need for overdue policy action. *The Lancet*, 395(10241), 1886–1888. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31303-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31303-9)
- Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., M. P. E. (2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemi. *New England Journal of Medicine*, 383(6), 508–510. <https://doi.org/10.1056/nejmp2013466>
- Carter, D. P., & May, P. J. (2020). Making sense of the U.S. COVID-19 Pandemi response: A policy regime perspective. *Administrative Theory and Praxis*, 42(2), 265–277. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1758991>
- Diwangkara, C. (2020). *UPAYA BELA NEGARA MELALUI KETAHANAN PANGAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (EFFORTS TO DEFEND COUNTRIES THROUGH FOOD SECURITY IN THE PANDEMI COVID-19)* (Vol. 19).
- Fahiza, Z., & Zalikha, S. N. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19 . ... *Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 48–55. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jrpm/article/view/629>
- Hadi, S. (1980). *Metodologi Riserch 1*. Gajah Mada.
- Hsiang, S., Allen, D., Annan-Phan, S., Bell, K., Bolliger, I., Chong, T., Druckenmiller, H., Huang, L. Y., Hultgren, A., Krasovich, E., Lau, P., Lee, J., Rolf, E., Tseng, J., & Wu, T. (2020). The effect of large-scale anti-contagion policies on the COVID-19 Pandemi. *Nature*, 584(7820), 262–267. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2404-8>
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Juaningsih, I. N. (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 189–196.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Tren Nasional (Akumulasi Data)*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Muhyiddin, O. (2020). Edisi Khusus tentang Covid-19 , New Normal, dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2). <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.120>
- Ratih, K., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar Stiarni*, 7(2). <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, (2020) (testimony of Republik Indonesia).
- Septiana Na'afi. (2020). Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19 . *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 1–9. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Soekanto, S. (1995). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 . *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global Pandemi of COVID-19 . *Finance Research Letters*, 36(April), 101528. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528>
- Zulfa Harirah MS, A. R. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>